

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA (Studi Kasus di Kecamatan Belopa Utara)

Juhria¹, Halim Usman², Ahmad Suardi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jendral Sudirman km 03, Kota Palopo

Email Correspondence: juhria@uamiruddin@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : August 10, 2023

Revised : August 18, 2023

Accepted : August 24, 2023

Kata Kunci: Sistem pengendalian internal, Kompetensi aparatur desa, dan Akuntabilitas dana desa.

Keywords: Internal control system, Competence of village apparatus, and Accountability of village funds.

ABSTRAK

Kasus korupsi pada sektor anggaran Dana Desa menjadi kasus yang terbanyak dibandingkan korupsi pada sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Belopa Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data yaitu skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

ABSTRACT

Corruption cases in the Village Fund budget sector are the most cases compared to corruption in other sectors. This study aims to determine the effect of the internal control system and the competence of the village apparatus on the accountability of village funds in North Belopa District. This research is a research with a quantitative approach. The data used is primary data. The sampling method used purposive sampling method with a total sample of 60 respondents. The data collection method is a survey using a questionnaire distributed to respondents. The data measurement scale is the Likert scale. Analysis of the influence of variables using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that the influence of the internal control system and the competence of the village apparatus has a negative but not significant effect on the accountability of village funds.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk sebagai Negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengupayakan pembangunan baik di kota maupun yang ada di Desa. Pemerintah Desa mengharapkan agar Desa bisa memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga maju. Hal ini tercantum dalam suatu penetapan peraturan pemerintah UU

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah memberikan kesempatan bagi Desa untuk mengelola Dana Desa secara mandiri dan juga dapat mengembangkan potensinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta dapat memperoleh kesejahteraan masyarakat Desa, agar pembangunan Desa dapat berjalan, maka di butuhkan Dana yang tidak sedikit. Dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa wajib untuk dikelola dengan baik.

Saat ini pengelolaan Dana Desa yang ada, tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena kenyataannya Dana Desa masih disalahgunakan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum menyatakan pada sektor anggaran Desa menjadi kasus yang terbanyak dibandingkan korupsi pada sektor lainnya,. Data ICW menunjukkan kasus korupsi Dana Desa yang terjadi beberapa tahun di bawah ini:

Tabel 1. Data Kasus Korupsi Dana Desa

No	Tahun	Kasus	Kerugian
1.	2017	98	30,11 miliar
2.	2018	96	37, 2 miliar
3.	2019	46	32, 3 miliar

Sumber: data ICW, 2021

Melihat tampilan data di atas, maka korupsi Dana Desa seringkali terjadi. Menurut Wana Alamsyah yang merupakan seorang peneliti di Kantor ICW, menyatakan bahwa banyaknya korupsi Dana Desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dalam hal pengawasan Dana Desa. Selain itu, Wana juga menambahkan bahwa pemerintah harus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan Desa. Untuk itu, pemerintah Desa harus memperhatikan hal utama salah satunya yaitu SPI yang tepat dan juga kemampuan atau kompetensi aparatur Desa. Sebagaimana menurut Dony Ahmad Munir selaku Bupati Sumedang yang menyatakan bahwa lemahnya SPI dan kurangnya sumber daya yang kompeten ditingkat organisasi menjadi penyebab terjadinya penyimpangan alokasi Dana Desa.

Menurut widyatama (2017) terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparatur Desa untuk meningkatkan akuntabilitas mengelola ADD yaitu masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam mengelola Dana Desa salah satunya kurangnya dalam hal penyusunan laporan keuangan, baik yang menyangkut tentang mekanisme, teknik sistem akuntansi, serta ketidaktahuan mengenai Standar Akutansi Pemerinatah (SAP) yang digunakan. Pencatatan laporan keuangan

Dana Desa benar-benar harus diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan suatu kerugian, Untuk itu, harus sesuai dengan kegunaan dan fungsinya yang efektif dan efisien terhadap tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan pemerintah, guna mewujudkan pelayanan pembangunan serta keuangan yang secara nyata. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Dana Desa yang dikelola harus berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan. Untuk itu, keberadaan SPI yang tepat dalam suatu pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan karena dengan adanya SPI dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan menurut pahlawan (2020) bahwa tingginya suatu tingkat kemampuan kompetensi aparatur Desa dapat meningkatkan pula akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Aparatur Desa yang memiliki kompetensi akan mampu mengelola Dana Desa dengan baik. Tingginya sebuah kompetensi aparatur diperoleh dari tingkat pendidikan yang ditempuh serta juga melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang topik SPI dan kompetensi aparatur Desa dalam mempengaruhi akuntabilitas Dana Desa, menghasilkan temuan. Menurut Ely Ayuningsih (2019) dan Mualifu, et al (2020) SPI berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kompetensi perangkat Desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan menurut Siti Nurhayati Nafsiah (2020) dan Risda Nurkhasanah (2020) SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD, dan menurut Dina Naryati, (2020) bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa; 2) Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Belopa Utara?. Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh Sistem pengendalian *intern*; 2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Belopa Utara.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991) dalam (Tika, 2019) . Teori stewardship lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Teori Stewardship dalam penelitian ini dapat dipahami dimana aparat Desa sebagai steward menyediakan laporan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Guna mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola Dana Desa yang memadai. Selain itu, pentingnya kompetensi aparatur sangat dibutuhkan guna menjalankan tugas dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator dalam mengukur sistem pengendalian intern menurut Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 yang telah dipakai sejak 1992 yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik

seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Menurut Mia, (2019) bahwa kompetensi selalu melekat pada diri seseorang karena menyangkut karakteristik seseorang dan bagaimana efektifitas seseorang dalam bekerja. Perangkat Desa ialah aparatur Desa dibawah pimpinan kepala Desa. Perangkat Desa merupakan salah satu unsur pemerintah Desa. Sebagai salah satu faktor pelaku Desa, perangkat Desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui Desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didaya gunakan oleh organisasi (Indrasari et al., 2007).

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola Dana Desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas Desa bisa berjalan dengan maksimal. pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah Desa dibutuhkan persiapan. Kompetensi aparatur Desa mutlak diperlukan agar pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan Desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya (Dewi & Gayatri, 2019).

Menurut Dina (2020) Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan juga dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan Dana Desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas. Adapun indikator yang mengukur kompetensi aparatur desa menurut Edison, *et all* (2016) yaitu mempunyai pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan, dan kesopanan.

Akuntabilitas Dana Desa

Menurut pandangan Dwiyanto, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada warga. Dana Desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Akuntabilitas proses dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Ini berarti bahwa diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai eksekutor kebijakan terhadap warga masyarakat guna mengetahui sudah sejauh mana pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakannya dalam upaya memenuhi harapan masyarakat. . Lembaga Administrasi Negara RI menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Nurkhasanah, 2019). Adapun indikator akuntabilitas dalam mengelola dana desa menurut solihin dalam Jamil *et all* (2020) yaitu kejujuran ketertiban informasi, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan.

Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan yaitu:

Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh sistem pengendalian *intern* (SPI) dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana Desa.

Ha: Diduga terdapat pengaruh sistem pengendalian *intern* (SPI) dan kompetensi aparatur desa

terhadap akuntabilitas dana Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor desa di Kecamatan Belopa Utara dengan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian sekitar ± 2 (dua) bulan dimulai dari April sampai Mei tahun 2021.

Populasi dan sampel

Populasi adalah daerah atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012) dalam (Choerunisa, 2019). Pada penelitian ini yang menjadi populasi yaitu desa di Kecamatan Belopa Utara yang berjumlah 6. Sedangkan Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. . Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu (Chandrain, 2017).

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yaitu data primer berupa jawaban responden terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang dikumpulkan dari Kantor Desa di Kecamatan Belopa Utara. Jenis kuesioner yaitu menggunakan skala likert yakni Sangat setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak setuju (TS), Sangat tidak setuju (STS).

Metode analisis data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS.

Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transpormasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Data responden yang diperoleh dari kuesioner serta penjelasannya sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif pada umumnya digunakan oleh penelitian untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain frekuensi, tendensi sentral (mean, median, modus) dan standar deviasi serta varian.

Uji instrumen penelitian Uji validitas

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk mencari validitas, harus mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan.

Uji reabilitas

Reabilitas adalah uji yang bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner dalam penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data variabel penelitian secara *reliable* atau tidak. Kuesioner yang *reliable* yaitu peneliti melakukan pengukuran data secara ulang dengan demikian akan mendapatkan hasil yang sama (konsisten).

Pengujian hipotesis

Hipotesis ini dihitung dengan cara melakukan Uji t (parsial) digunakan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nilai positif atau negative digunakan untuk menentukan arah. Pengujian tersebut dilakukan dengan dua rah (2 tails). Tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n- 1-k. apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen begitupun dengan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o diterima dan H_a di tolak.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel bebas. Untuk menghitung koefisien determinasi diperlukan nilai kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.

Uji F (uji simultan)

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian *intern* dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dana desa. Populasi dari penelitian adalah aparatur di Kantor Desa Kecamatan Belopa Utara dengan lingkup sampel penelitian yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala Desa, sekertaris Desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, dan kepala dusun. Selain itu, sampel di tentukan dari masa kerja aparatur desa minimum 2 tahun dan tingkat pendidikan minimum SMA/SLTA sederajat. Adapun kuesioner yang disebarakan sebanyak 76, akan tetapi yang kembali dan dapat diolah sebanyak 60. Sisa kuesioner yang tidak kembali sebanyak 16. Dibawah ini adalah tabel demografi responden yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. Demografi Responden

Keterangan	jumlah	presentase
Tingkat pendidikan		
SLTA	33	55%
D3	5	8%
S1	22	37%
Jumlah	60	100%
Masa kerja		
2-3	19	32%
3 ke atas	41	68%
Jumlah	60	100%
Jabatan		
BPD	17	28,2%
Kepala desa	5	8,3%
Sekertaris desa	5	8,3%
Kaur keuangan	5	8,3%
Kaur umum	5	8,3%
Kasi pemerintahan	5	8,3%
Kasi kesejahteraan dan pelayanan	5	8,3%
Kepala dusun	13	22%
Jumlah	60	100%

Uji deskriptif

Analisis deskriptif pada umumnya digunakan oleh penelitian untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Dalam statistik

deskriptif dilihat pada nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.

Tabel 3 Uji statistik deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	60	74.00	115.00	96.1667	8.64981
Kompetensi Aparatur Desa	60	32.00	44.00	38.1500	3.06884
Akuntabilitas Dana Desa	60	27.00	40.00	33.2833	3.64106
Valid N (<i>listwise</i>)	60				

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh data sebanyak 60 data. Data tersebut berasal dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Tabel diatas menggambarkan statisti deskriptif untuk variabel independen (sistem pengendalian *intern*, kompetensi aparatur desa), dan variabel dependen (akuntabilitas dana desa). Pada tabel diatas menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap Sistem Pengendalian *Intern* menunjukkan nilai minimum sebesar 74, nilai maksimum sebesar 115, mean (rata-rata) sebesar 96.1667 dengan standar deviasi sebesar 8,64981. selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel Kompetensi Aparatur Desa menunjukkan nilai minimum 32, nilai maksimum sebesar 44, mean (rat-rata) sebesar 38.1500 dengan standar deviasi 3.06884. sedangkan variabel Akuntabilitas Dana Desa menunjukkan nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum 40, *mean* (rata-rata) sebesar 33.2833, dengan standar deviasi 3.64106. Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel sistem pengendalian *intern* yaitu 96.1667. Sedangkan yang terendah adalah variabel akuntabilitas dana desa yakni 33.2833.

Uji validitas data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat valid atau sahny suatu kuesioner. Pedoman suatu model dikatakan jika hasil dari $R_{hitung} > R_{tabel}$ dengantingkat signifikansinya 0,05 maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Tabel 4 Hasil uji validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	X1.1	0,414	0,254	Valid

Sistem Pengendalian Intrern (SPI)	X1.2	0,650	0,254	Valid
	X1.3	0,639	0,254	Valid
	X1.4	0,297	0,254	Valid
	X1.5	0,628	0,254	Valid
	X1.6	0,714	0,254	Valid
	X1.7	0,651	0,254	Valid
	X1.8	0,386	0,254	Valid
	X1.9	0,459	0,254	Valid
	X1.10	0,575	0,254	Valid
	X1.11	0,692	0,254	Valid
	X1.12	0,575	0,254	Valid
	X1.13	0,698	0,254	Valid
	X1.14	0,627	0,254	Valid
	X1.15	0,591	0,254	Valid
	X1.16	0,648	0,254	Valid
	X1.17	0,527	0,254	Valid
	X1.18	0,541	0,254	Valid
	X1.19	0,588	0,254	Valid
	X1.20	0,299	0,254	Valid
	X1.21	0,501	0,254	Valid
	X1.22	0,606	0,254	Valid
	X1.23	0,577	0,254	Valid
Kompetensi Aparatur Desa	X2.1	0,693	0,254	Valid
	X2.2	0,640	0,254	Valid
	X2.3	0,657	0,254	Valid
	X2.4	0,635	0,254	Valid
	X2.5	0,657	0,254	Valid
	X2.6	0,524	0,254	Valid
	X2.7	0,531	0,254	Valid
	X2.8	0,419	0,254	Valid
	X2.9	0,379	0,254	Valid
Akuntabilitas Dana Desa	Y.1	0,628	0,254	Valid
	Y.2	0,688	0,254	Valid
	Y.3	0,579	0,254	Valid
	Y.4	0,787	0,254	Valid

Y.5	0,642	0,254	Valid
Y.6	0,749	0,254	Valid
Y.7	0,750	0,254	Valid
Y.8	0,732	0,254	Valid

Berdasarkan tabel 4. diatas, maka dapat diketahui bahwa variabel independen dan dependen beserta item-item pernyataan yang diuji berdasarkan aplikasi SPSS versi. 22 dinyatakan valid, karena nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

Uji reliabilitas

Pengujian reabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator pada suatu variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Adapun nilai ketentuan untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *cronbach alpha* $> 0,6$

Tabel 5 Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Alpha</i> Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Sistem pengendalian <i>intern</i> (X_1)	0,847	0.6	Reliabel
Kompetensi aparatur desa (X_2)	0,740	0.6	Reliabel
Akuntabilitas dana desa (Y)	0,847	0.6	Reliabel

Berdasarkan tabel 5 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinyatakan telah reliabel karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari nilai 0,6, artinya hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang telah digunakan mampu memperoleh data yang konsisten yang memiliki arti bahwa pernyataan yang diajukan akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya

Hasil hipotesis

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan dilakukan uji dua hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode regresi linear berganda.

Tabel 6 Ringkasan hasil analisis regresi linear berganda

$$Y = 7,648 - 0,085 X_1 + 0,293 + e$$

	Koefisien	t-statistik	sig.
Constant	7,648	2,088	0,041
X ₁	0,085	1,076	0,287
X ₂	0,293	1,440	0,155

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dijelaskan yaitu nilai konstanta pada persamaan regresi diatas sebesar 7,648 artinya bahwa jika variabel independen (sistem pengendalian *intern* dan kompetensi aparatur desa) adalah nol maka akuntabilitas dana desa nilainya sebesar 7,648. Sedangkan nilai Adj. R² sebesar 0,161 atau 16 persen. Hal ini dapat diketahui sistem pengendalian *intern* dan kompetensi aparatur desa secara bersama mempengaruhi akuntabilitas dana desa sebesar 16 persen. Adapun nilai F_{hitung} 6,672 > F_{tabel} 3,16 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002 < 0,05. Maka menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* dan kompetensi aparatur desa secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

1. Sistem pengendalian *intern*

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka variabel sistem pengendalian *intern* (X₁) diperoleh t_{hitung} 1.076 < t_{tabel} 2.001 serta dengan tingkat signifikansi sebesar 0,287 > 0,05 artinya sistem pengendalian *intern* tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Maka dengan ini dinyatakan hipotesis ditolak.

2. Kompetensi aparatur desa

Diketahui variabel kompetensi aparatur desa (X₂) dengan t_{hitung} 1.440 < t_{tabel} 2.001 serta tingkat signifikansi sebesar 0,155 > 0,05 artinya kompetensi aparatur desa tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Maka dengan ini dinyatakan hipotesis ditolak.

Pembahasan

Pengaruh sistem pengendalian *intern* terhadap akuntabilitas dana desa diKecamatan Belopa Utara.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian *intern* tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal dikarenakan bahwa sistem pengendalian *intern* belum optimal

untuk dijalankan, sehingga menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam mengelola dana desa seperti keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan desa dapat terkendali. Melihat hal tersebut aparatur desa belum optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga mempengaruhi sistem pengendalian *intern*. Sebagai *Steward* pemerintah desa dapat mengarahkan kemampuan dan keahlian secara optimal, agar pengendalian *intern* dapat menghasilkan laporan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Didukung oleh penelitian Pahlawan, *et all*, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian *intern* belum optimal dikarenakan kurangnya tanggung jawab para aparatur desa sehingga mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mei Diana, (2020) menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tidak sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Ely Ayu Ningsih, (2019) dan Mualifu, (2020) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Belopa Utara.

Hipotesis yang kedua variabel kompetensi aparatur desa tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini disebabkan karena kompetensi maupun tingkat pendidikan aparatur desa tergolong masih lemah dalam mengelola dana desa yang terbilang cukup besar. Selain itu, dibuktikan pada kuesioner yang menjelaskan sebagian responden (aparatur desa) didominasi dengan latar pendidikan lulusan (SMA), sehingga rendahnya kompetensi aparatur desa, akan berdampak pada akuntabilitas dana desa. Sebagaimana kompetensi aparatur merupakan aspek pribadi dari seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut mencapai kinerja dengan baik. Sebagai *steward* pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan dana desa.

Untuk itu, kompetensi aparat sangat memiliki pengaruh besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika aparat desa memiliki keahlian dan pengetahuan dalam mengelola keuangan dana desa, maka pengelolaan keuangan semakin berkualitas. Dengan demikian,

aparatur harus mengasah kemampuan dan keterampilan diri agar dalam melakukan tugas dan tanggungjawab berjalan dengan baik, sehingga suatu pengambilan keputusan secara tepat dan mencapai tujuan organisasi. Didukung oleh penelitian pahlawan (2020) bahwa tingginya suatu tingkat kemampuan kompetensi aparatur desa dapat meningkatkan pula akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Aparatur Desa yang memiliki kompetensi akan mampu mengelola Dana Desa dengan baik serta penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah, (2019) menyatakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci Atningsih *et all*, (2019) dan Siti Sarah (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian *intern* dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kantor Desa Kecamatan Belopa Utara. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian *intern* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. , yang berarti bahwa sistem pengendalian *intern* belum optimal untuk dijalankan, sehingga dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam mengelola dana desa.
2. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini disebabkan karena kompetensi maupun tingkat pendidikan aparatur desa tergolong masih lemah dalam mengelola dana desa yang terbilang cukup besar. Selain itu, dibuktikan pada kuesioner yang menjelaskan sebagian responden (aparatur desa) didominasi dengan latar pendidikan lulusan (SMA), sehingga rendahnya kompetensi aparatur desa, akan berdampak pada akuntabilitas dana desa.

Saran

1. pemerintah desa diharapkan lebih terampil, dan cekatan dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, pemerintah Desa harus mengadakan bimbingan dan pelatihan kepada

aparatur desa yang dilakukan setiap tahunnya terkait tentang penyusunan data, merencanakan anggaran, pergorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan, supaya tidak terjadi penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh pengelola keuangan desa.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dan variabel penelitian lainnya dengan sektor yang berbeda dengan jumlah data yang lebih banyak, agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziiz, M. N. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Chandrain Grahita. 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta:Penerbit Salemba Empat.
- Choerunisa, A. 2019. Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Corporate. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9):1689–1699.
- Devi, S. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Palopo.
- Dewi, N. K. A. J. P., dan Gayatri, G. 2019. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26:12-69.
- Dina, N. 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Patumbak. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Medan
- Ely Ayining Astuty. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Evicahyani, S. I., dan Setiawina, N. D. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5.3:403-428.

- Handayani. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri. Surakarta
- Jamil, N. A., Rusli, A., dan Muhani, P. M. 2020. Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu). *Jurnal Studi Akuntansi*. 12.
- Komulasari, Z. 2017. Pengaruh Locus Of Control Dan Komitmen Profesional Terhadap Kinerja Auditor Internal. *Jurnal Metode Penelitian* 1–32.
- Lovita, L., dan Rustiana. 2016. Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1):1–15.
- Mia, R. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri. Surakarta
- Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan. 2019. pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Teknik Universitas Sains Al-Qur'an*, Vol 1 (1).
- Nurkhasanah. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang
- Novelino, Andry. 2019. ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat. <https://m.cnnindonesia.com>. 28 Januari 2021 (10.00)
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., dan Suhendro, S. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2):162.
- Prodjo, Wahyu Adityo. 2020. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Raih Gelar Doktor dari Unpad. <https://edukasi.kompas.com> dan info@wahyuuap. 2 Januari 2021 (09.10).

- Ramadhan, Ardito. 2020. Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019. <https://nasional.kompas.com>. 2 Januari 2021 (11.10).
- Rezeki, S. E. 2019. Peran Tingkat Pendidikan Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tambakromo. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rezkiyanti, Y. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi* 17-24.
- Risda Nur Khasanah. 2020. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Pancasakti. Tegal.
- Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Inragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Riau*, 4(4):330-342)
- Suci Atningsih, Aulia Cahya Ningtyas. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, STIE Bank BPD Jateng, Vol 10 (1).
- Tika, R. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Magelang
- Widyatama, A., Novita, L., dan Diarespati, D. 2017. Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2):1–20.
- Walyati, Fifat Nur. 2020. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Magelang.